



RENCANA STRATEGIS

**DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI & UKM
KOTA JAMBI**

2025 - 2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi Tahun 2025 – 2029 dapat diselesaikan. Dokumen ini disusun sebagai langkah awal perangkat daerah dalam merencanakan strategi yang akan dijalankan untuk menjabarkan arah tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Jambi di bidang ketenagakerjaan, perkoperasian dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan, dengan mengevaluasi hasil capaian periode sebelumnya, mempertimbangkan kondisi saat ini dan prediksi kondisi di masa yang akan datang. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator dan target kinerja yang akan dicapai, yang akan dijabarkan setiap tahunnya melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah, dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Jambi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025 – 2029.

Dengan disusunnya dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini diharapkan upaya-upaya yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan efektif, efisien, berkesinambungan dan tepat sasaran.

Jambi, Juli 2025

**Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Koperasi dan UKM Kota Jambi**



Ir. Monca Widaryanto

Pembina Utama Muda

NIP.19650926 199903 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.3.1. Maksud	5
1.3.2. Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, ISU STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM KOTA JAMBI	
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi.....	8
2.1.1. Tugas Pokok.....	8
2.1.2. Fungsi.....	8
2.1.3. Struktur Organisasi	10
2.2. Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi.....	11
2.2.1. Susunan Kepegawaian	11
2.2.2. Perlengkapan Aset yang Dikelola.....	13
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi UKM Kota Jambi.....	13
2.3.1. Kondisi Saat ini	13
2.4. Permasalahan dan Isu Strategis	39
2.4.1. Permasalahan	39
2.4.2. Isu Strategis.....	42
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Visi dan Misi Kepala Daerah	44
3.2. Tujuan Perangkat Daerah.....	46
3.3. Sasaran Perangkat Daerah.....	48

	3.4. Strategi dan Arah kebijakan	49
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	
	4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	51
	4.2. Program Prioritas Perangkat Daerah	57
BAB V	PENUTUP	65

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel	2.1	Jumlah Pegawai Menurut Klasifikasi Status Kepegawaian 12
Tabel	2.2	Jumlah ASN Menurut Klasifikasi Tingkat Pendidikan 12
Tabel	2.3	Jumlah ASN Menurut Klasifikasi Golongan 12
Tabel	2.4	Daftar Barang Inventaris Penunjang Operasional Kantor 13
Tabel	2.5	Data Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2020 - 2024 15
Tabel	2.6	Program Kegiatan Bidang Penta Latas 2020 - 2024..... 15
Tabel	2.7	Jumlah Kasus Perselisihan HI Tahun 2020 - 2024..... 18
Tabel	2.8	Program Kegiatan Bidang HI dan Jamsostek Tahun 2020 - 2024 19
Tabel	2.9	Data Keragaan Koperasi Binaan di Kota Jambi Tahun 2020 - 2024 22
Tabel	2.10	Program Kegiatan Bidang Perkoperasian Tahun 2020 - 2024..... 23
Tabel	2.11	Koperasi Aktif per Kecamatan Tahun 2024 24
Tabel	2.12	Data Jumlah UMKM per Kecamatan Tahun 2024 25
Tabel	2.13	Jumlah Kelompok UMKM Binaan 27
Tabel	2.14	Program Kegiatan Bidang UMKM Tahun 2020 - 2024..... 28
Tabel	2.15	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 - 2024..... 30
Tabel	2.16	Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2020-2024 31
Tabel	2.17	Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2020-2024 43
Tabel	3.1	Indikator dan Target Tujuan Sasaran Tahun 2025 - 2030 49
Tabel	4.1	Rencana Program Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan 52
Tabel	4.2	Program Prioritas Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM 57
Tabel	4.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 - 2030..... 59
Tabel	4.4	Indikator Kinerja Kunci Urusan Tenaga Kerja Tahun 2025 - 2030 60
Tabel	4.5	Indikator Kinerja Kunci Urusan Koperasi UMKM 2025 - 2030..... 63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2024 menjadi tahun bersejarah dalam dunia demokrasi di Indonesia, dimana untuk pertama kalinya dilaksanakan pemilihan langsung secara serentak kepala daerah dan wakil kepala daerah dari tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten/kota, setelah sebelumnya di tahun yang sama dilaksanakan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden, hingga ditetapkan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.

Terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, menjadi momentum dimulainya tahapan pembangunan di periode terbaru, karena berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa setiap pemerintahan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diwajibkan menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Langkah awal tahapan Pembangunan Nasional telah dimulai dengan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menentukan arah pembangunannya dan menuangkan konsep pembangunan tersebut dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan menyelaraskan isu strategis, tujuan, sasaran hingga program-program prioritas pembangunan nasional dengan mempertimbangkan kondisi yang ada di daerah masing-masing.

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen perencanaan pemerintah daerah

kabupaten/kota menjadi pedoman bagi organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) di lingkup internalnya yang memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut melalui penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah. Strategi dan kebijakan yang akan diterapkan dalam melaksanakan tugas tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Pembangunan bidang Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik perorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat dalam rangka peningkatan harkat martabat dan kualitas hidup. Dengan terwujudnya tujuan tersebut, diharapkan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga berimbas pada keberhasilan peran pemerintah dalam memecahkan berbagai permasalahan sosial yang timbul. Secara umum keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan salah satu wujud nyata dari pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.

Tatanan ekonomi kerakyatan di Indonesia merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dan telah terbukti menjadi pengaman perekonomian nasional saat krisis terjadi serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi selama masa pandemi.

Saat ini, paradigma pembangunan dan pemberdayaan ketenagakerjaan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) lebih diarahkan pada upaya penciptaan kemandirian, partisipasi, daya inovasi dan kreativitas para pencari kerja, tenaga kerja serta pelaku/pengelola koperasi

maupun pelaku usaha mikro kecil dan menengah, pemerintah dalam hal ini berfungsi sebagai motivator dan fasilitator yang akan mendorong masing-masing personil dan lembaga yang terlibat langsung dalam pembangunan urusan ketenagakerjaan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) guna menghasilkan sumber daya manusia dan kelompok usaha yang berkualitas dan mandiri dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin kompleks.

Lebih dari itu, pembangunan di bidang ketenagakerjaan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diharapkan mampu memperluas basis ekonomi kerakyatan dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian Kota Jambi.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi Periode Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1924 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Tenaga Kerja;
9. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1787);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024-2044 (Lembar Daerah tahun 2024 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Tahun 2024 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
18. Peraturan Walikota Jambi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Renstra Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi tahun 2025-2029 adalah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari Renstra Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi adalah :

- a. Menjabarkan arah RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 ke dalam rencana instansional, agar terwujud sinkronisasi perencanaan pembangunan yang berkesinambungan;
- b. Menjabarkan strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsi guna mencapai target kinerja;
- c. Menjadi pedoman bagi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan urusan ketenagakerjaan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Jambi;
- d. Menjadi pedoman penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi Periode 2025–2029 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat penjelasan umum latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi Periode Tahun 2025-2029.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM KOTA JAMBI

Bab ini memuat uraian tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki dan kinerja pelayanan kepada masyarakat serta identifikasi permasalahan dan isu strategis

daerah berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berhubungan dengan program prioritas.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi yang akan dicapai serta dilaksanakan untuk mewujudkan visi misi kepala daerah.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator, target, pagu indikatif, dan kelompok sasaran dalam rangka mencapai target kinerja 5 (lima) tahun ke depan;

BAB VII : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan strategi dan kebijakan perangkat daerah dalam menjalankan program kegiatan dalam upaya mencapai target kinerja perangkat daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM KOTA JAMBI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Tenaga kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi, dan melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi.

2.1.1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja, koperasi dan usahakecil menengah.

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

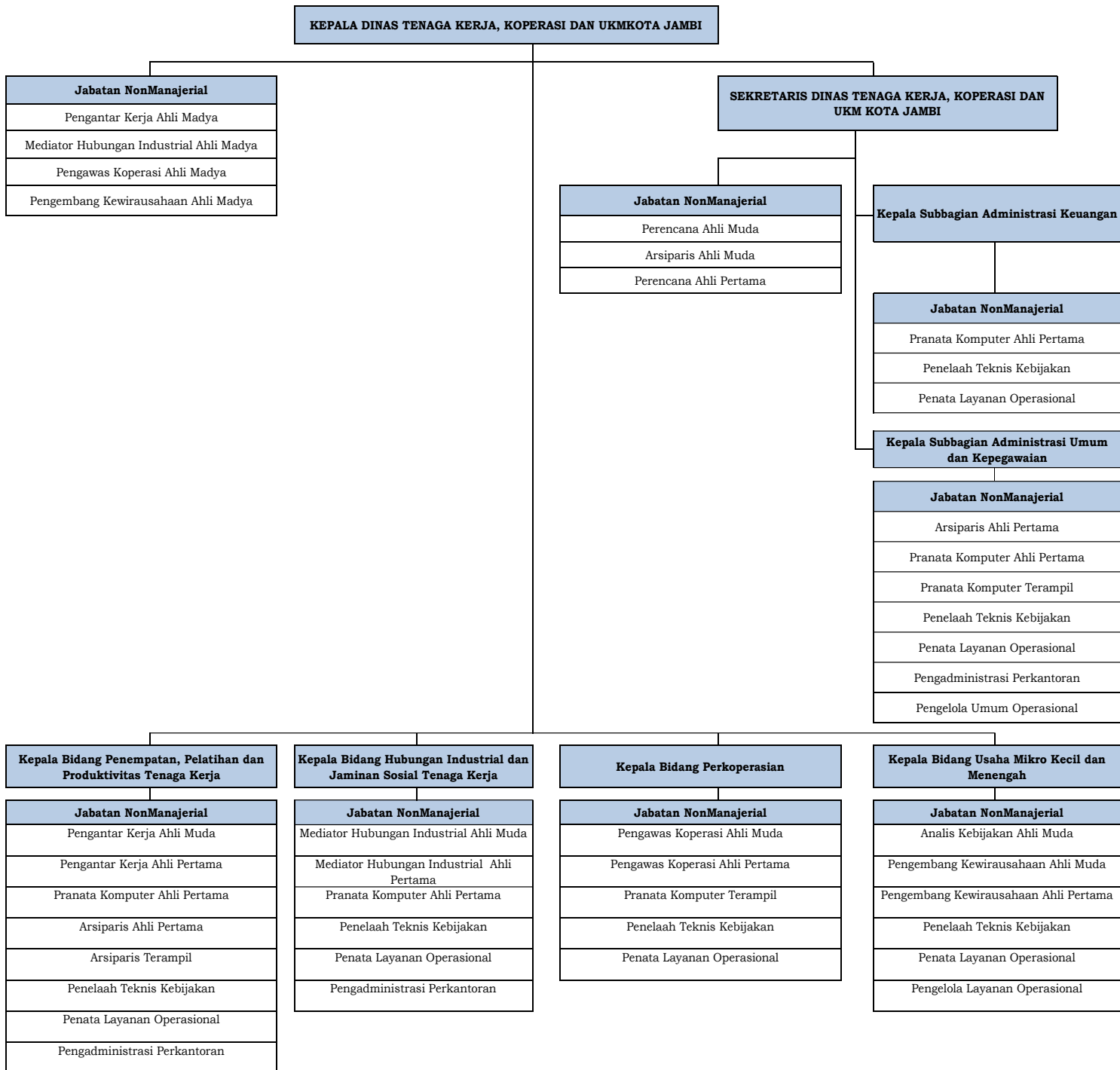
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penempatan dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, persyaratan kerja, pengawasan koperasi serta Koperasi dan usaha kecil menengah;
- b. Penyusunan perencanaan di bidang penempatan dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, persyaratan kerja, pengawasan koperasi serta Koperasi dan usaha kecil menengah;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup urusan tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah;
- d. Penyusunan program dan anggaran;
- e. Pengelolaan administrasi keuangan;
- f. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan

- barang milik negara;
- g. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara;
- h. Pelaksanaan kebijakan pelayanan penempatan dan produktivitas tenaga kerja;
- i. Pelaksanaan kebijakan pelayanan hubungan industrial, persyaratan kerja dan pengawasan koperasi;
- j. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perkoperasian;
- k. Pelaksanaan kebijakan pelayanan usaha kecil menengah;
- l. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan pengawasan bidang urusan tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah;
- m. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- n. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- o. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup urusan koperasi, usaha menengah dan tenaga kerja;
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi, dapat dilihat pada halaman berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, maka susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat memiliki 2 (dua) Sub Bagian dan 1 (satu) Jabatan fungsional, yaitu:
 - 1) Sub Bagian Pengelola Administrasi Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Jabatan Fungsional Perencana;
- c. Bidang Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja memiliki Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Ahli Pertama dan Ahli Muda
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Pengantar Kerja memiliki Pejabat Fungsional Ahli Muda
- e. Bidang Perkoperasian memiliki Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi
- f. Bidang UMKM memiliki Pejabat Fungsional Analisi Kebijakan Ahli Muda

2.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi

2.2.1. Susunan Kepegawaian

Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Jambi per 31 Desember 2024 memiliki Sumber Daya Aparatur sebanyak 65 orang, terdiri dari PNS sebanyak 27 orang, PPPK sebanyak 18 orang dan TTKK sebanyak 20 orang. PNS sebanyak 27 orang, terdiri dari pejabat struktural sebanyak 7 orang, jabatan fungsional ahli muda (hasil penyetaraan) sebanyak 10 orang dan staf fungsional umum sebanyak 10 orang.

Kondisi pegawai Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi per 31 Desember 2024 sesuai klasifikasinya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Menurut Klasifikasi
Status Kepegawaian & Jenis Kelamin
Per 31 Desember 2024

No	Pegawai	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	12	15	27
2	PPPK	8	10	18
3	TKK	12	8	20
	Jumlah	32	33	65

Tabel 2.2.
Jumlah ASN Menurut Klasifikasi
Tingkat Pendidikan
Per 31 Desember 2024

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket
1	Pasca Sarjana	3	
2	Sarjana	39	
3	Sarjana Muda	3	
4	SMA Sederajat	1	
5	SMP	-	
6	SD	-	
	Jumlah	46	

Tabel 2.3
Jumlah ASN Menurut Klasifikasi Golongan
Per 31 Desember 2024

No	PNS		PPPK		Ket
	Golongan	Jumlah	Golongan	Jumlah	
1	IV/c	1	IX	15	
2	IV/b	1	VII	3	
3	IV/a	1			
4	III/d	15			
5	III/c	4			
6	III/b	3			
7	III/a	3			
8	II/d	-			
9	II/c	-			
10	II/b	-			
	Jumlah	28		18	

2.2.2. Perlengkapan Aset Yang Dikelola

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi ditunjang dengan tersedianya gedung dan bangunan yang berlokasi di Jalan KH. Agus Salim Komplek Perkantoran Kota Baru Jambi dan dilengkapi dengan prasarana penunjang lainnya, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4.
Daftar Barang Inventaris Penunjang Operasional Kantor

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan	
				Baik	Rusak
1	Kendaraan Roda 4	6	Unit	6	0
2	Kendaraan Roda 2	17	Unit	15	2
3	AC	35	Unit	25	10
4	Komputer (PC)	32	Unit	30	2
5	Laptop	21	Unit	16	5
6	Notebook	2	Unit	0	2
7	Filling Cabinet	10	Unit	10	0
8	Printer	43	Unit	34	9
9	Scanner	2	Unit	2	0
10	Meja	78	Unit	68	10
11	Kursi	74	Unit	60	14
12	Lemari	41	Unit	35	6
13	Kulkas	2	Unit	2	0
14	Proyektor	3	Unit	2	1
TOTAL		366	Unit	305	61

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi

2.3.1. Kondisi Saat Ini

a. Ketenagakerjaan

Sesuai data dari BPS Kota Jambi sampai dengan Desember 2024, penduduk Kota Jambi berjumlah 635.101 jiwa yang terdiri dari 319.396 jiwa laki-laki dan 315.705 jiwa perempuan. Dari angka tersebut, penduduk yang berada dalam rentang usia produktif (penduduk usia kerja) berjumlah sebesar 485.734 jiwa atau sekitar 76,48%. Dengan angkatan kerja sebesar 323.318 jiwa.

Dari jumlah angkatan kerja tersebut, jumlah penduduk yang bekerja sebesar 299.443 jiwa. Dapat diketahui bahwa jumlah

pengangguran terbuka di Kota Jambi sampai akhir Desember 2024 yaitu 23.875 jiwa atau 7,38%.

Data ini menunjukkan dengan kedudukan Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi yang merupakan pusat perekonomian dan pelayanan, potensi jumlah tenaga kerja di Kota Jambi sangat besar. Akan tetapi jumlah tersebut belum berbanding lurus dengan kualitas pencari kerja dan lowongan yang masih terbatas. Permasalahan klasik masih menjadi faktor utama cukup besarnya angka pengangguran di Kota Jambi, seperti pencari kerja dengan keahlian rendah (low skill) sehingga sulit bersaing di pasar kerja, upah minimum Kota Jambi tertinggi di Provinsi Jambi sehingga menarik pencari kerja datang ke Kota Jambi, karakter pencari kerja (terutama lulusan S1) yang kurang meminati posisi marketing (lowongan terbanyak di pasar kerja), dan lulusan sekolah menengah (SMU/SMK) sampai Perguruan Tinggi belum sebanding dengan pasar kerja yang ada.

Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi menjalankan perannya untuk meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja dan menekan tingkat pengangguran terbuka melalui program kegiatan yang relevan dengan kewenangannya dengan menyesuaikan kondisi ketenagakerjaan saat ini serta sumber daya dan sarana prasarana pendukung yang ada.

Upaya meningkatkan angka partisipasi angkatan kerja dan menekan tingkat pengangguran terbuka menjadi tugas lintas perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, karena penyebab masih tingginya angka pengangguran disebabkan banyak faktor yang kewenangan masing-masing faktor tersebut diakomodir beberapa perangkat daerah. Adapun beberapa faktor penyebabnya antara lain tingkat pendidikan baik formal maupun informal, kondisi usaha yang kondusif, iklim investasi, kesehatan hingga kondisi ekonomi secara keseluruhan. Untuk urusan ketenagakerjaan ini, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya yaitu

meningkatkan jumlah penyerapan pencari kerja terdaftar dan memfasilitasi terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pemilik usaha di Kota Jambi. Peran tersebut diharapkan akan berdampak signifikan dalam menekan angka pengangguran di Kota Jambi.

Guna mendukung capaian kinerja tugas dan fungsi tersebut, telah dilaksanakan beberapa program kegiatan yang diakomodir oleh Bidang Penempatan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja selama kurun waktu 2020-2024

Secara lebih rinci data jumlah penyerapan pencari kerja di Kota Jambi, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Data Penyerapan Tenaga Kerja
Tahun 2020 - 2024

No.	TAHUN	PENCAKER TERDAFTAR			PENEMPATAN			PERSENTASE PENEMPATAN TERHADAP PENCAKER TERDAFTAR
		Lk	Pr	JUMLAH	Lk	Pr	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	12
1	2020	1.994	1.741	3.735	612	604	1216	32,56%
2	2021	1.426	1.044	2.470	547	458	1005	40,69%
3	2022	969	625	1.594	340	322	662	41,53%
4	2023	777	637	1.414	306	284	590	41,73%
5	2024	692	565	1.257	334	305	639	50,84%

Sumber data : Bidang Pentalatas DTKK-UKM

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa penempatan pencari kerja terdaftar di pasar kerja setiap tahun semakin meningkat, meskipun baru di tahun 2024 capaian diatas 50%.

Adapun program kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian kinerja tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Program Kegiatan
Bidang Penempatan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

NO	TAHUN	KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		KET
			TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI	
1	2020	1.1 Pelatihan Berbasis kompetensi			Rp 560.000.000	Rp 481.845.000	
		Pelatihan Keterampilan Desain Grafis	20 Orang	20 Orang			
		Pelatihan Keterampilan Menjahit	40 Orang	40 Orang			
		Pelatihan Tata Rias Kecantikan	40 Orang	40 Orang			
		Pelatihan Service AC	15 Orang	15 Orang			
		Pelatihan Operator Komputer	15 Orang	15 Orang			
		1.2 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	500 lowongan	760 lowongan	Rp 64.705.000	Rp 56.204.650	
2	2021	2.1 Pelatihan Berbasis kompetensi			Rp 443.615.104	Rp 443.375.704	
		Pelatihan Menjahit	20 Orang	20 Orang			
		Pelatihan Teknisi Komputer	20 Orang	20 Orang			
		Pelatihan Teknisi AC	20 Orang	20 Orang			
		Pelatihan Las Listrik	20 Orang	20 Orang			
		2.2 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	25 LPKS	25 LPKS	Rp 15.776.600	Rp 15.776.600	
		2.3 Konsultasi Produktivitas Perusahaan Kecil (UMKM)	25 Perusahaan/UMKM	25 Perusahaan/UMKM	Rp 10.677.495	Rp 10.568.245	
2.4 Pelayanan Antar Kerja	Sertifikasi ISO	Sertifikasi ISO	Rp 62.016.906	Rp 61.116.906			
2.5 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	800 lowongan	1076 lowongan	Rp 139.526.900	Rp 139.447.400			
3	2022	3.1 Pelatihan Berbasis kompetensi			Rp 387.307.804	Rp 383.019.093	
		Pelatihan Barista	16 Orang	16 Orang			
		Pelatihan Design Grafis	16 Orang	16 Orang			
		Pelatihan Instalasi Listrik	16 Orang	16 Orang			
		Pelatihan Komputer Dasar	16 Orang	16 Orang			
		3.2 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	25 LPKS	25 LPKS	Rp 16.348.850	Rp 16.310.850	
		3.3 Pembinaan Perusahaan Kecil (UMKM)	25 Perusahaan/UMKM	25 Perusahaan/UMKM	Rp 20.574.850	Rp 20.537.150	
3.4 Pelayanan Antar Kerja	Sertifikasi ISO	Sertifikasi ISO	Rp 96.084.080	Rp 86.979.185			
3.5 Penyuluhan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	24 BKK	24 BKK	Rp 16.127.310	Rp 16.089.310			
3.6 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	500 lowongan	669 lowongan	Rp 108.396.519	Rp 102.392.198			
4	2023	4.1 Pelatihan Berbasis kompetensi			Rp 339.892.098	Rp 323.237.950	
		Pelatihan Tata Kecantikan Kulit	16 Orang	16 Orang			
		Pelatihan Service AC	33 Orang	33 Orang			
		Uji Kompetensi MUA dan Modifikasi Rias Pengantin	16 Orang	16 Orang			
		4.2 Perluasan Kesempatan Kerja	Dokumen KA	Dokumen KA	Rp 214.999.920	Rp 179.922.602	
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	1.000 lowongan	1.271 lowongan	Rp 92.040.542	Rp 83.644.808			
5	2024	Pelatihan Berbasis kompetensi					
		Pelatihan Tata Kecantikan Rambut	16 Orang	16 Orang	Rp 155.298.915	Rp 145.765.730	
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	1.000 lowongan	948 lowongan	Rp 84.300.958	Rp 83.150.660	

Sumber data : Bidang Pentalatas DTKK-UKM

Dari tabel diatas dapat diketahui Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi telah melaksanakan beberapa kegiatan yang difokuskan bagi pencari kerja terdaftar. Data pencari kerja terdaftar dihimpun berdasarkan jumlah pencari kerja yang

mengurus kartu AK1 (kartu pencari kerja). Kegiatan yang dilaksanakan yaitu, pelatihan berbasis kompetensi, pengelolaan informasi pasar kerja (IPK) baik secara online maupun offline (job fair), dan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), pembinaan pada Bursa Kerja Khusus (BKK) yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Jambi.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mengakomodir para pencari kerja terdaftar untuk diberikan keterampilan melalui pelatihan, sehingga pencari kerja tersebut dapat mengisi lowongan pada pasar kerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki atau membuka usaha secara mandiri (wirausaha). Pencari kerja terdaftar juga difasilitasi dengan kegiatan layanan antar kerja untuk mendapatkan informasi lowongan kerja. Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM juga melaksanakan pembinaan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dan Bursa Kerja Khusus (BKK) yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai mitra untuk menghasilkan pencari kerja berketerampilan yang siap masuk ke dunia kerja.

Selain Bidang Penempatan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja (Pentalatas), urusan ketenagakerjaan juga diakomodir oleh Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (HI dan Jamsostek). Jika Bidang Pentalatas fokus pada pencari kerja terdaftar dan lembaga peningkatan keterampilan pencaker, Bidang HI dan Jamsostek fokus pada tenaga kerja dan pemilik usaha (perusahaan) di wilayah Kota Jambi, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha.

Salah satu tolak ukur keharmonisan hubungan industrial, dapat dilihat dari jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang dicatatkan hingga diselesaikan oleh mediator HI di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM.

Selama kurun waktu 2020-2024, jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang dicatatkan dan diselesaikan, sebagai berikut :

Tabel 2.7
Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial
Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Kasus Yang Dicatatkan	Diselesaikan			Ket
			Perjanjian Bersama	Anjuran	Tutup	
1	2020	76 Kasus	47 Kasus	15 Kasus	14 Kasus	
2	2021	54 Kasus	39 Kasus	5 Kasus	10 Kasus	
3	2022	51 Kasus	32 Kasus	8 Kasus	11 Kasus	
4	2023	61 Kasus	43 Kasus	7 Kasus	11 Kasus	
5	2024	38 Kasus	27 Kasus	5 Kasus	6 Kasus	

Sumber data : Bidang HI & Jamsostek DTKK-UKM

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kasus hubungan industrial yang dicatatkan setiap tahun selama kurun waktu 2020-2024, semakin menurun dengan persentase penyelesaian dengan perjanjian bersama (PB) juga meningkat.

Adapun program kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian kinerja tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Program Kegiatan
Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek

NO	TAHUN	KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		KET
			TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI	
1	2020	1.1 Fasilitas Penyelesaian prosedur Perselisihan HI			Rp 324.775.000	Rp 170.956.700	
		1.2 Fasilitas Penyelesaian Prosedur Perlindungan Hukum dan Jamsostek	30 Perusahaan	30 Perusahaan	Rp 64.705.000	Rp 56.204.650	
2	2021	2.1 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	20 PP	20 PP	Rp 22.449.772	Rp 21.679.072	
		2.2 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana HI dan Jamsostek	30 Perusahaan	30 Perusahaan	Rp 57.218.460	Rp 57.192.740	
		2.3 Pencegahan Perselisihan HI, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	20 Perusahaan	20 Perusahaan	Rp 57.279.597	Rp 56.255.940	
		2.4 Penyelesaian Perselisihan HI, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	50 Kasus	54 Kasus	Rp 46.360.118	Rp 46.312.268	
		2.5 Pelaksanaan Operasional LKS Tripartit	1 LKS	1 LKS	Rp 145.726.021	Rp 142.689.721	
3	2022	3.1 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran PKB	20 PP	20 PP	Rp 6.386.050	Rp 6.386.050	
		3.2 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana HI dan Jamsostek	10 Perusahaan	10 Perusahaan	Rp 15.049.990	Rp 14.966.890	
		3.3 Pencegahan Perselisihan HI, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	20 Perusahaan	20 Perusahaan	Rp 128.775.781	Rp 121.019.832	
		3.4 Penyelesaian Perselisihan HI, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	50 Kasus	51 Kasus	Rp 34.311.320	Rp 34.101.320	
		3.5 Pelaksanaan Operasional LKS Tripartit	1 LKS	1 LKS	Rp 191.666.210	Rp 191.505.410	
4	2023	4.1 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana HI dan Jamsostek	20 Perusahaan	20 Perusahaan	Rp 38.962.963	Rp 37.832.810	
		4.2 Pelaksanaan Operasional LKS Tripartit	1 LKS	1 LKS	Rp 189.976.135	Rp 175.593.764	
5	2024	5.1 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana HI dan Jamsostek	20 Perusahaan	36 Perusahaan	Rp 23.066.100	Rp 21.212.380	
		5.2 Pelaksanaan Operasional LKS Tripartit	1 LKS	1 LKS	Rp 215.114.845	Rp 212.686.960	

Sumber data : Bidang HI dan Jamsostek DTKK-UKM

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi telah melaksanakan beberapa program kegiatan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara tenaga kerja dan pemilik usaha (pengusaha). Dalam pelaksanaan setiap program kegiatan setiap tahunnya,

dapat disimpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi kondusifnya hubungan industrial di Kota Jambi, yaitu :

1. Pemutakhiran data perusahaan pada aplikasi wajib lapor Kemenaker RI (Aplikasi yang memuat data ketenagakerjaan perusahaan di setiap Kabupaten/Kota)
2. Peran aktif Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit.
3. Sosialisasi dan pendampingan secara kontinu dari pembina untuk meningkatkan kesadaran pemilik usaha/pelaku usaha (perusahaan) untuk memiliki peraturan perusahaan (PP) atau perjanjian kerja bersama (PKB), yang menjadi pedoman bagi pekerja dan pengusaha memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, guna mencegah munculnya perselisihan hubungan industrial
4. Peran aktif mediator hubungan industrial dalam memfasilitasi perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan/dicatatkan ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi
5. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha/pemilik usaha (pengusaha) dan tenaga kerja tentang pentingnya perlindungan bagi pekerja melalui jaminan sosial tenaga kerja.

Sampai akhir tahun 2024, jumlah perusahaan di Kota Jambi yang tercatat di aplikasi wajib lapor Kemenaker RI sebanyak 6.131 perusahaan. Dari jumlah tersebut perusahaan yang telah memiliki PP/PKB sebanyak 835 perusahaan. Jika dibandingkan dengan data tersebut, maka jumlah perselisihan hubungan industrial yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Kota Jambi di akhir tahun 2024, masih dalam rasio yang rendah.

Meski demikian, peran aktif pembina dalam memperbaharui data perusahaan dan mendampingi pemilik usaha/pelaku usaha (pengusaha) yang belum memiliki PP/PKB harus terus ditingkatkan mengingat keberadaan data aktual dan PP/PKB menjadi pedoman awal terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara tenaga kerja dan pemilik usaha/pelaku usaha (pengusaha), karena jika dilihat dari rasio jumlah PP/PKB yang telah disahkan dengan

jumlah perusahaan yang tercatat di aplikasi wajib lapor, baru sebesar 13,61%.

b. Perkoperasian

Koperasi merupakan gerakan ekonomi kerakyatan yang keberadaannya di tengah masyarakat masih dibutuhkan meski perkembangan dan persaingan usaha jasa keuangan sangat beragam dan modern. Dengan animo dan kepercayaan masyarakat itulah, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi terus berupaya meningkatkan kualitas koperasi aktif yang ada sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian di Kota Jambi, sebagai salah satu bukti keberpihakan pemerintah terhadap upaya masyarakat membangun ekosistem keuangan yang mandiri.

Sampai dengan Desember tahun 2024, total jumlah koperasi di Kota Jambi sebanyak 457 koperasi. Dari jumlah tersebut, koperasi aktif sebanyak 220 koperasi atau sebesar 48,14%. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi melalui bidang perkoperasian telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas koperasi aktif yang menjadi binaan. Koperasi berkualitas memberikan berbagai manfaat bagi anggota maupun masyarakat disekitarnya, karena koperasi berkualitas telah dikelola sesuai aturan manajerial koperasi yang berlaku.

Selama kurun 2020-2024, jumlah koperasi berkualitas terus meningkat sesuai dengan capaian target kinerja bidang perkoperasian . Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Data Keragaan Koperasi Binaan di Kota Jambi
Tahun 2020- 2024

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koperasi	457	457	457	457	457
	-Koperasi Aktif	220	220	220	220	220
	-Koperasi Berkualitas	43	58	74	97	111
2	Jumlah Anggota	15.314	23.660	13.907	14.230	273.033
3	Modal Sendiri	120.445.229.165	103.720.253.186	104.892.573.009	89.581.238.401	330.972.473.800
4	Modal Luar	69.225.109.389	66.002.718.945	16.720.521.923	47.830.113.986	1.114.106.519.314
5	Asset	260.411.189.465	185.411.644.596	179.835.689.429	147.585.068.814	1.460.964.832.599
6	Volume Usaha	141.581.572.472	118.092.015.435	149.967.589.648	124.916.095.359	1.136.781.120.205
7	Sisa Hasil Usaha (SHU)	24.724.161.205	15.688.672.465	18.408.463.329	11.950.786.275	18.640.892.076

Sumber data : Bidang Perkoperasian DTKK-UKM

Adapun program kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian tersebut, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Program Kegiatan Bidang Perkoperasian
Tahun 2020 - 2024

NO	TAHUN	KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		KET	
			TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI		
1	2020	1.1 Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Perkoperasian			Rp 413.500.000	Rp 337.593.000		
		Workshop Peningkatan Partisipasi Anggota	20 Koperasi	20 Koperasi				
		Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pengurus Koperasi	30 Orang	30 Orang				
		Bimtek Pengelolaan Koperasi Syariah	60 Orang	60 Orang				
		Pelatihan Sistem Informasi Akuntansi Koperasi (SIAKop)	20 Orang	20 Orang				
		Pelatihan Perkoperasian Bagi Kelompok Ekonomi Produktif	8 Koperasi	8 Koperasi				
		Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Pengelola KSP/USP	24 Orang	24 orang				
		Bimtek Akuntansi Koperasi Bagi Pengurus/Pengelola Koperasi	60 Orang	60 Orang				
		1.2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	30 Koperasi	30 Koperasi	Rp 17.393.500	Rp 17.376.800		
		2	2021	2.1 Pelayanan Izin Usaha Simpan pinjam untuk Koperasi	40 Koperasi	40 Koperasi	Rp 39.999.870	Rp 39.842.140
2.2 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	30 Koperasi			30 Koperasi	Rp 20.178.154	Rp 17.280.140		
2.3 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian					Rp 393.362.244	Rp 379.556.701		
Workshop peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi	40 Koperasi			40 Koperasi				
Workshop Penguatan Kelembagaan Koperasi	20 Koperasi			20 Koperasi				
Bimtek Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian	30 Koperasi			30 Koperasi				
Bimtek Akuntansi Koperasi Bagi Pengurus Koperasi	20 Orang			20 Orang				
Pelatihan Sistem Informasi Akuntansi Koperasi (SIAKop)	40 Orang			40 Orang				
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pengurus/Pengelola Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam	80 Orang			80 Orang				
3	2022			3.1 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	100 Koperasi	100 Koperasi	Rp 33.443.984	Rp 31.235.440
		3.2 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian			Rp 442.859.441	Rp 441.841.181		
		Bimtek Pengelolaan Koperasi Syariah	30 Orang	30 Orang				
		Pelatihan Sistem Informasi Akuntansi Koperasi (SIAKop)	40 Orang	40 Orang				
		Pelatihan Teknologi Informasi Koperasi	30 Orang	30 Orang				
		Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Pengelola KSP/USP	30 Orang	30 Orang				
		Pelatihan Dasar Akuntansi Koperasi	30 Orang	30 Orang				
		Pelatihan Teknis Pengawasan Koperasi	30 Orang	30 Orang				
		3.3 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas Usaha Koperasi			Rp 148.033.430	Rp 140.771.530		
		Bimtek Penyusunan Peraturan Kelembagaan Koperasi	30 Orang	30 Orang				
4	2023	4.1 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Sosialisasi Pengembangan Koperasi Melalui Partisipasi Anggota	8 Koperasi	8 Koperasi			
			Talkshow Modernisasi Koperasi	30 Orang	30 Orang			
			Pelatihan SIAKop	40 Orang	40 Orang	Rp 358.383.320	Rp 349.128.235	
		4.2 Pemberdayaan Perlindungan Koperasi	Pelatihan Pengawasan Koperasi	40 Orang	40 Orang			
			Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pengurus Koperasi	25 Orang	25 Orang			
			Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pengurus Koperasi	25 Orang	25 Orang			
5	2024	5.1 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pelatihan Kemitraan Usaha	25 Orang	25 Orang	Rp 134.461.795	Rp 132.824.040	
			Pembekalan Operator SDM Koperasi	15 Orang	15 Orang			
			5.2 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas Usaha Koperasi	70 Unit Usaha	52 Unit Usaha	Rp 32.481.640	Rp 30.349.880	

Pelaksanaan program kegiatan di tahun 2024, didasarkan oleh target kinerja pencapaian koperasi modern sesuai dengan program prioritas pemerintah pusat. Indikator terpenting dalam menetapkan koperasi termasuk kategori modern, yaitu penggunaan Teknologi Informasi dalam pengelolaan koperasi. Namun indikator ini dinilai cukup berat bagi koperasi yang ada di Kota Jambi mengingat masih terbatasnya koperasi yang menggunakan aplikasi dalam kegiatan operasionalnya.

Secara keseluruhan, jumlah koperasi aktif yang ada di Kota Jambi berdasarkan lokasi per kecamatan, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.11

KOPERASI AKTIF BERDASARKAN KECAMATAN TAHUN 2024			
No.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KOPERASI	KETERANGAN
1	KEC. TELANAI PURA	44	
2	KEC. JAMBI SELATAN	14	
3	KEC. JAMBI TIMUR	15	
4	KEC. PASAR JAMBI	19	
5	KEC. PELAYANGAN	4	
6	KEC. DANAU TELUK	4	
7	KEC. KOTABARU	45	
8	KEC. JELUTUNG	19	
9	KEC. ALAM BARAJO	19	
10	KEC. DANAU SIPIN	18	
11	KEC. PAAL MERAH	19	
JUMLAH		220	

Sumber data : Bidang Perkoperasian DTKK-UKM

c. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pembinaan UMKM di Kota Jambi merupakan salah satu program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kota Jambi periode

sebelumnya dan di akomodir dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM. Kontribusi pelaku UMKM memiliki peran yang sangat krusial dalam menggerakkan roda perekonomian. Meskipun kendala yang di hadapi dalam melaksanakan program kegiatan belum sepenuhnya dapat diatasi, namun diharapkan dengan adanya pembinaan berkelanjutan serta sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diminimalisasi guna menciptakan UMKM berkualitas ditengah masyarakat.

Selama kurun waktu 2000 – 2024, Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi telah melakukan berbagai pembinaan kepada pelaku-pelaku UMKM binaan, untuk meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing di pasaran. Sampai dengan Desember 2024, jumlah UMKM binaan yang terdata per wilayah kecamatan di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12
Data UMKM per Kecamatan
Desember 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Telanaipura	4.226
2	Jambi Selatan	5.865
3	Jambi Timur	6.520
4	Pasar Jambi	925
5	Pelayangan	1.637
6	Danau Teluk	2.076
7	kotabaru	5.271
8	Jelutung	4.776
9	Alam Barajo	4.584
10	Danau Sipin	4.532
11	Paal Merah	6.584
JUMLAH		46.996

Sumber data : Bidang UMKM DTKK-UKM

Pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas UMKM diawali dengan pembenahan manajemen yang lebih teratur,

melalui pembentukan kelompok UMKM, baik secara mandiri maupun yang dibina oleh kantor kelurahan. Dengan pembinaan melalui kelompok, kegiatan yang dilaksanakan akan lebih terarah dan fokus pada pengembangan usaha bersama. Jumlah kelompok UMKM yang dibina, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.13
Jumlah Kelompok UMKM Binaan
Tahun 2024

NO	NAMA KELOMPOK	NAMA KETUA KELOMPOK	JUMLAH ANGGOTA
1	BERKAH MAK MAK	DEWI SULISTIOWATI	73
2	BERKAH JAYA BERSAMA	TITIK GUSTRIANI	35
3	BERSINAR	OSMARIA	37
4	GARUDA MANDIRI JAYA	FENY TITANIA	26
5	KOMUNITAS MUSLIMAH KREATIF	WINNI WARDANI WATIR	47
6	LASKAR ABBASY	YESI NOVITA SARI	27
7	SAHABAT SEHATI	DAHLIA	55
8	SETUJU	ZURaida	45
9	SINERGI BERSAMA	HAPSARI RENO WIDURI	35
10	TERATAI	RUSMINI	19
11	AMANAH SEJAHTERA	DARMAWATI	30
12	CEMERLANG	JURIAH GAZALI	181
13	DANAU SIPIN BERJAYA	WINDA APRIDA	51
14	EMAK EMAK JUARA	FITRI TRESNA LESTARI	32
15	GENTALA	NAJWA NABILAH	16
16	KOBAR BERSATU	RACHMI IZZATI	28
17	MAJU BERSAMA	ASNI MARLINA	19
18	MAWAR	MARIA ULFA	36
19	PANDAN	HAYATI	38
20	PUSPA	MARINA TRI HARTATI	27
21	SAT ARUNIKA	JURAINI	24
TOTAL KESELURUHAN			881

Sumber data : Bidang UMKM DTKK-UKM

Program Kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.14
Program Kegiatan Bidang UMKM Tahun 2020-2024

NO	TAHUN	KEGIATAN	KINERJA		ANGGARAN		KET
			TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI	
1	2020	1.1 Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah			Rp 250.000.000	Rp 238.209.400	
		Pelatihan Olahan Makanan	80 Orang	80 Orang			
		Pelatihan Sertifikasi Halal	30 Orang	30 Orang			
		Pelatihan Handycraft	60 Orang	60 Orang			
		Pelatihan Manajemen Pengelolaan UKM	20 Orang	20 Orang			
		1.2 Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah Untuk UMKM	80 orang	80 orang	Rp 19.654.750	Rp 17.654.750	
		1.3 Penguatan Pemasaran Bagi Produk UMKM	1 dok data	1 dok data	Rp 148.100.000	Rp 93.717.500	
2	2021	2.1 Pemberdayaan Usaha mikro Yg Dilakukan Melalui Pendataan	1 dok data	1 dok data	Rp 202.889.976	Rp 188.301.426	
		2.2 Fasilitasi Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil			Rp 143.678.430	Rp 120.697.130	
		Pelatihan Sertifikasi Label Halal	10 Orang	10 Orang			
		Pelatihan Handycraft	80 Orang	80 Orang			
		Pelatihan Aneka Olahan Makanan	80 Orang	80 Orang			
		2.3 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro			Rp 145.919.968	Rp 144.565.768	
		Pelatihan Kewirausahaan	30 Orang	30 Orang			
		Pelatihan Manajemen Pembiayaan	50 orang	50 orang			
3	2022	3.1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro			Rp 150.000.057	Rp 149.804.770	
		Pelatihan Wirausaha Pemula (Handycraft dan Aneka Olahan Makanan)	125 Orang	125 Orang			
		Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pelaku Usaha Daerah Pengembangan Wisata Seberang	50 Orang	50 Orang			
		3.2 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha mikro	10 kel UMKM	10 kel UMKM	Rp 168.288.656	Rp 144.047.090	
		3.3 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Pengembangan Usaha Mikro			Rp 500.000.000	Rp 476.332.099	
		Bimtek Sertifikasi Label Halal	20 Orang	20 Orang			
		Pelatihan Aplikasi Pembukuan Bagi Pelaku UMKM	40 Orang	40 Orang			
		Bantuan Hibah Barang (Blender, Kompor, Kual, Kukusan, Mixer)	332 Unit	332 Unit			
4	2023	4.1 Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro	44 Orang	44 Orang	Rp 149.199.994	Rp 133.291.230	
		4.2 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro			Rp 1.930.017.576	Rp 1.882.667.256	
		Kurasi Produk	10 kel UMKM	10 kel UMKM			
		Bantuan Hibah Barang (Blender, Kompor, Kual, Kukusan, Mixer)	1.563 Unit	1.563 Unit			
5	2024	5.1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro	55 Orang	55 Orang	Rp 23.066.100	Rp 21.212.380	
		5.2 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Pengembangan Usaha Mikro			Rp 1.158.750.839	Rp 1.037.623.943	
		Bantuan Hibah Barang (Blender, Kompor, Kual, Kukusan, Mixer)	654 Unit	654 Unit			

Sumber data : Bidang UMKM DTKK-UKM

Dengan program kegiatan yang telah dilaksanakan, capaian kinerja UMKM berkualitas telah melebihi target, namun pembinaan berkelanjutan akan terus dibutuhkan mengingat pertumbuhan UMKM dari tahun ke tahun masih mudah mengalami pasang surut.

Ditahun 2024, indikator sasaran untuk pembinaan UMKM, menjadi UMKM naik kelas. Data yang mendasari penetapan indikator kinerja ini adalah UMKM berkualitas yang diproyeksikan untuk dinaikkan level produk, pemasaran dan inovasinya menjadi UMKM yang lebih berdaya saing.

Dari uraian penyelenggaraan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi diatas, dapat disimpulkan bahwa program kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 2020 – 2024, capaian target kinerja terhadap indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.15
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Perhitungan	2020		2021		2022		2023		2024		
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya produktivitas dan penempatan tenaga kerja, serta hubungan industrial yang harmonis	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	$\frac{\text{Jmh Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$	65,25%	64,12%	-	-	-	-	-	-	-	-	
			$\frac{\text{Jmh Pengangguran Terbuka}}{\text{Jmh Angkatan Kerja}} \times 100\%$	-	-	10,37%	10,66%	9,60%	8,95%	8,50%	8,27%	-	-	
		Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Terdaftar	$\frac{\text{Jmh Tenaga Kerja Yg Ditempatkan}}{\text{Jmh Tenaga Kerja Terdaftar}} \times 100\%$	-	-	-	-	-	-	-	-	42,00%	50,83%	-
		2. Persentase Penyelesaian Perselisihan Hub Industrial Dgn PB	$\frac{\text{Jmh Kasus yg Diselesaikan Dgn PB}}{\text{Jmh Kasus yg Dicatatkan}} \times 100\%$	57,00%	61,85%	58,00%	72,22%	59,00%	100%	-	-	-	-	-
		Persentase Penyelesaian Perselisihan Hub Industrial	$\frac{\text{Jmh Kasus yg Diselesaikan}}{\text{Jmh Kasus yg Dicatatkan}} \times 100\%$	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro kecil menengah	3. Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	$\frac{\text{Jmh UKM Berkualitas}}{\text{Jmh UKM Yg Dibina}} \times 100\%$	8,54%	8,54%	9,02%	9,02%	9,47%	9,57%	9,94%	10,49%	-	-	
			$\frac{\text{Jmh UMKM Naik Kelas}}{\text{Jmh UMKM Yg Dibina}} \times 100\%$	-	-	-	-	-	-	-	-	7,15%	5,30%	
		4. Persentase koperasi berkualitas	$\frac{\text{Jmh Koperasi Berkualitas}}{\text{Jmh Koperasi Aktif}} \times 100\%$	19,27%	19,73%	23,85%	26,36%	32,72%	33,64%	44,09%	45,00%	-	-	
		Persentase Koperasi Modern	$\frac{\text{Jmh Koperasi Modern}}{\text{Jmh Koperasi Berkualitas}} \times 100\%$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,46%	12,37%

Tabel 2.16
Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2020-2024

INDIKATOR KINERJA KUNCI
URUSAN TENAGA KERJA KOTA JAMBI

NO	OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN			
			2021	2022	2023	2024
1	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$\frac{\text{jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100 \%$	255.73%	79.10%	75.73%	100%
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100 \%$	7.25%	7.43%	Menunggu data dukung dari BPS Kota Jambi	Menunggu data dukung dari BPS Kota Jambi
3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100 \%$	26.68%	19.54%	14.59%	13.61%
4	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar}} \times 100 \%$	40.69%	662%	41.73%	50.83%
5	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD}}{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan}} \times 100 \%$	66.67%	100%	50.00%	82.11%
NO	OUTPUT	RUMUS	CAPAIAN			
			2021	2022	2023	2024
1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	$\frac{\text{Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNi atau okupasi pada tahun n}}{\text{kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n}} \times 100 \%$	33.33%	3%	25.00%	12.50%
2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n}}{\text{Jumlah instruktur keseluruhan}} \times 100 \%$	38.39%	47.41%	161.22%	93.58%

Rencana Strategis 2025-2029

3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	$\frac{\text{Jumlah Instruktur Pada tahun n}}{\text{Jumlah peserta pelatihan pada tahun n}} \times 100 \%$	140%	116%	161.22%	487%
4	Persentase LPK yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n}}{\text{Jumlah seluruh LPK pada tahun n}} \times 100 \%$	9.52%	1%	4.54%	0%
5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	$\frac{\text{Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n}}{\text{Jumlah LPK yang terdata}} \times 100 \%$	100%	63.16%	77.27%	80.00%
6	Jumlah penganggur yang dilatih		8	64	49	16
7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n}}{\text{jumlah orang yang dilatih pada tahun n}} \times 100 \%$	100%	64%	100.00%	100%
8	Persentase penyerapan lulusan	$\frac{\text{Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n}}{\text{jumlah lulusan pada tahun n}} \times 100 \%$	51%	25%	87.75%	68.75%
9	Lulusan bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n}}{\text{jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n}} \times 100 \%$	100%	100%	32.65%	0%
10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	$\frac{\text{CPMI dilatih}}{\text{CPMI terdaftar}} \times 100 \%$	100%	57%	100%	100%
11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)		20	0	66	0
12	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	$\frac{\text{Jmlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n}}{\text{jumlah perusahaan pada tahun n}} \times 100 \%$	1.14%	1.01%	0.58%	0,09%
13	Data tingkat produktivitas total		0	5-17	36	
14	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n}}{\text{10 orang atau lebih}} \times 100 \%$	22.68%	316%	148.09%	144.44%

Rencana Strategis 2025-2029

15	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n}}{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB}} \times 100 \%$	55.00%	106%	59.28%	15.56%
16	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan		160	163	167	167
17	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah}}{\text{Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB)}} \times 100 \%$	15.03%	135%	40.16%	142.45%
18	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sdah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor}} \times 100 \%$	281.27%	100%	155.76%	
19	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang berselisih}}{\text{Jumlah perusahaan pada tahun n}} \times 100 \%$	0%	51%	2.02%	0.61%
20	Jumlah mogok kerja		1	1	Tidak ada mogok kerja pada tahun n	0
21	Jumlah penutupan perusahaan		1	0	Tidak ada penutupan perusahaan pada tahun n	0
22	Jumlah perselisihan kepentingan		1	1	2	0
23	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan		0	0	Tidak ada perselisihan antar sp/sb dlm 1 perusahaan pd thn n	0
24	Jumlah perselisihan PHK		52	49	57	36
25	Jumlah pekerja/buruh yang ter- PHK		101	72	71	51
26	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite		13	3	5	6

Rencana Strategis 2025-2029

27	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan		42	1	45	
28	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah perjanjian bersama ----- Jumlah kasus perselisihan x 100 %	72%	64.71%	70.49%	71.05%
29	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota		1072	669	1271	1776
30	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota		2470	1594	1414	1257
31	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota		29	30	30	29
32	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota		10	21	33	43
33	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja		0	3	3	6
34	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota		1	1	2	3
35	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota		11	47	34	118
36	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)		1005	7	3	5
37	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi ----- CPMI/CTKI x 100 %	0	57%	100%	100%
38	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata		20	57	66	23
39	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	Dengan rincian : Fasilitasi PMI yang di pulangkan ----- PMI yang pulang x 100 %	0	0	Tidak ada CPMI/CTKI yg difasilitasi kepulangannya pd thn n	0
40	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja ----- PMI/TKI x 100 %	100%	57%	100%	100%

Rencana Strategis 2025-2029

41	Data pemberdayaan PekerjaMigran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	$\frac{\text{PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan}}{\text{PMI/TKI purna dan keluarganya}} \times 100 \%$	0	0	Tidak ada PMI/TKI yg diberdayakan pd thn n	0
42	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	$\frac{\text{LTSE yang terbentuk}}{\text{Jumlah daerah kantong PMI/TKI :}} \times 100 \%$	0	0	Tidak ada LTSA yang dibentuk pd thn n	0
43	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.		1	1	1	1
44	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	$\frac{\text{Realisasi Indikator -target indikator :}}{\text{realisasi :}} \times 100 \%$	0	50%	50%	50%
45	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota		2200	0	141	141

**INDIKATOR KINERJA KUNCI
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA JAMBI**

NO	OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN			
			2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT , Volume usaha dan Aset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100 \%$	26.36%	74.00%	47.72%	38.18%
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan}} \times 100 \%$	92.77%	44.05%	28.75%	13.91%
NO	OUTPUT	RUMUS	CAPAIAN			
			2021	2022	2023	2024
1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam}} \times 100 \%$	0	3.89%	Tidak ada izin USP yg diterbitkan pd thn n	0

Rencana Strategis 2025-2029

2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	<p>Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor usaha simpan pinjam pada tahun yang di laporkan</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang-cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan</p>	0	0	Tidak ada izin pembukaan kantor cabang pd thn n	0
3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	<p>Jumlah koperasi yang diperiksa dan di awasi</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah Koperasi yang ada</p>	7.73%	50.00%	21.81%	38.18%
4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	<p>Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada</p>	24.09%	67.00%	21.81%	38.18%
5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	<p>Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah koperasi yang ada</p>	54.55%	106.00%	35.90%	21.36%
6	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dalam daerah kabupaten/kota dengan wilayah keanggotaan	<p>Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah anggota koperasi yang ada</p>	2.48%	477.00%	0.38%	29.54%
7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	<p>Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah koperasi yang ada</p>	1.82%	0.45%	0.45%	1.81%
8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan		35	2	22	0
9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	<p>Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) _____ x</p> <p>100 % Jumlah koperasi yang ada</p>	31.82%	73.00%	42.72%	44.09%
10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	<p>Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemayaan</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah koperasi yang ada</p>	15.91%	11.36%	10.00%	0%

Rencana Strategis 2025-2029

11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran}}{\text{Jumlah Koperasi yang ada}} \times 100 \%$	0	5.00%	Tidak ada koperasi yg difasilitasi pemasaran pd thn n	0%
12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100 \%$	70.91%	111.00%	37.72%	1.36%
13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan}}{\text{Jumlah Koperasi yang ada}} \times 100 \%$	0.91%	0.91%	2.72%	11.36%
14	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	$\frac{\text{Jumlah pertumbuhan wirausaha baru}}{\text{jumlah wirausaha yang ada}} \times 100 \%$	27.51%	4.56%	28.75%	1.39%
15	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS)}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100 \%$	29.66%	42.44%	35.92%	0%
16	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang bermitra}}{\text{jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100 \%$	100%	0.28%	0.1%	0.07%
17	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi}}{\text{Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk}} \times 100 \%$	0.14%	1.07%	2.36%	0.93%
18	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran}}{\text{Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran}} \times 100 \%$	4.39%	7651.81%	0.11%	1.00%
19	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100 \%$	4.21%	1.07%	1.54%	0.47%

Rencana Strategis 2025-2029

20	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	$\frac{\text{Jumlah usah mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100 \%$	2.58%	2.11%	0.56%	1.55%
----	---	---	-------	-------	-------	-------

2.4. Permasalahan dan Isu Strategis

2.4.1. Permasalahan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM, yaitu :

a. Ketenagakerjaan

1. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja

Hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan/keahlian yang spesifik, yang sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan pasar kerja.

2. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja

Jumlah angkatan kerja yang terus bertambah, sedangkan ketersediaan lapangan kerja belum memadai

3. Upah Minimum Kota (UMK) Kota Jambi lebih Kurangh besar dari kabupaten/kota lain di Provinsi Jambi sehingga menarik pencari kerja dari daerah untuk mencari kerja di Kota Jambi.

4. Karakteristik pencari kerja yang memilih-milih pekerjaan

Lowongan yang paling banyak tersedia di pasar kerja, justru tidak disukai oleh pencari kerja (lowongan marketing)

5. Masih kurangnya jiwa wirausaha di kalangan generasi muda untuk membuka usaha secara mandiri

6. Kurangnya SDM Mediator Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi

7. Masih terbatasnya pengetahuan dan pemahaman pekerja akan hak dan kewajibannya

8. Belum maksimalnya fungsi Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) sebagai organisasi pekerja dan mitra bagi pemilik usaha (pengusaha)

9. Masih terbatasnya kesadaran pemilik usaha untuk mendaftarkan Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai pedoman bagi pekerja dan pemilik usaha (pengusaha) dalam menyelesaikan perselisihan industrial

10. Belum optimalnya perlindungan dan pengawasan terhadap tenaga kerja karena masih kurangnya informasi serta data perusahaan yang telah mengikutsertakan tenaga kerja dalam asuransi ketenagakerjaan.

b. Perkoperasian

1. Terbatasnya SDM pengurus/pengelola koperasi yang berkompentensi dan profesional
2. Terbatasnya jenis usaha koperasi, sehingga cenderung sulit untuk meningkatkan omset dan aset yang dimiliki
3. Terbatasnya akses koperasi terhadap lembaga-lembaga permodalan
4. Terbatasnya pemahaman masyarakat secara umum, dan anggota koperasi khususnya tentang nilai dan prinsip-prinsip perkoperasian sesuai ketentuan yang berlaku
5. Terbatasnya kemampuan koperasi dalam menggunakan teknologi informasi dalam pengelolaan koperasi sehingga berdampak pada sulitnya koperasi bersaing dengan lembaga keuangan yang lebih modern

c. UMKM

1. Terbatasnya keterampilan dan pengetahuan manajerial pelaku UMKM sehingga produk yang dihasilkan kurang inovatif dan adaptif dengan perkembangan jaman
2. Terbatasnya akses modal dan pembiayaan
3. Terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi sehingga sulit bersaing di pasar digital yang saat ini sedang trend

2.4.2. Isu Strategis

Analisa isu-isu strategis menjadi bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang kemudian menjadi dasar menentukan tahapan yang akan dilaksanakan dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja program kegiatan prioritas sesuai dengan urusan dan tugas fungsi setiap perangkat daerah.

Adapun isu-isu strategis dalam pembangunan ketengakerjaan, perkoperasian dan UMKM, yaitu :

- a. Ketenagakerjaan
 1. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka
 2. Stabilitas ekonomi
 3. Bonus demografi yang belum dikelola dengan maksimal
 4. Penyebaran tenaga kerja belum merata
 5. Kesenjangan antara keterampilan dan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia kerja
 6. Transformasi digital di dunia kerja
 7. Perlindungan tenaga kerja formal dan informal
 8. Kebijakan manajemen tenaga kerja asing
 9. Kebijakan hubungan industrial
- b. Perkoperasian
 1. Penguatan Kelembagaan dan pengawasan koperasi
 2. Peningkatan akses pembiayaan
 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
 4. Regulasi dan kebijakan yang mendukung
 5. Transformasi digital di dunia pengelolaan jasa keuangan
- c. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 1. Peningkatan akses pembiayaan untuk meningkatkan modal usaha
 2. Regulasi dan kebijakan terkait standarisasi produk dan legalitas usaha
 3. Inovasi produk dan jaringan pemasaran
 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
 5. Transformasi digital di dunia usaha

Dari masalah dan isu strategis diatas diketahui bahwa pembangunan ketenagakerjaan, koperasi dan UMKM merupakan aspek-aspek yang saling terkait dalam pembangunan ekonomi. Ketiganya harus berjalan seiring untuk menciptakan sumber daya yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan ketiga aspek ini ikut menjadi kungsi keberhasilan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Identifikasi masalah dan isu strategis yang mempengaruhi rencana penerapan kebijakan melalui pelaksanaan program kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi secara rinci tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2.17
Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kota Jambi sebagai ibu kota Provinsi sekaligus sebagai pusat perekonomian dan pelayanan jasa berdampak pada terbukanya peluang usaha	1. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja	1. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	1. Persaingan Global	1. Tingkat pengangguran terbuka	1. Tingkat pengangguran usia produktif	1. Pencari kerja terdaftar di dominasi tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat
	2. Jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja	2. Perlindungan sosial bagi tenaga kerja	2. Transformasi digital	2. Stabilitas ekonomi	2. Daya saing pencari kerja di pasar kerja	2. Kesenjangan keterampilan dan kompetensi pencari kerja terdaftar dengan kebutuhan dunia kerja
	3. Terbatasnya informasi lowongan kerja	3. Perluasan kesempatan kerja	3. Pergeseran pasar kerja	3. Bonus demografi yang belum dikelola dengan baik	3. Akses dan ketersediaan lowongan kerja	3. Lowongan kerja yang tersedia kurang diminati pencari (contoh : posisi marketing)
	4. Karakter pencari kerja yang memilih-milih pekerjaan	4. Akses pembiayaan dan pemasaran	4. Perlindungan Sosial	4. Penyebaran tenaga kerja yang belum merata	4. Pengawasan dan perlindungan sosial bagi tenaga kerja	4. UMK Kota Jambi tertinggi dibanding kabupaten/kota lain di Provinsi Jambi
	5. Terbatasnya quota peserta pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari terdaftar	5. Kemajuan Teknologi Informasi		5. Kesenjangan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan di pasar kerja	5. Kebijakan hubungan industrial yang belum difahami tenaga kerja dan pemilik usaha (perusahaan)	5. Akses data ketenagakerjaan belum optimal dan transparan
	6. Kurangnya SDM Mediator HI di Disnakerkop & UKM			6. Transformasi digital	6. Profesionalisme dalam pengelolaan koperasi dan produk UMKM	6. Keterkaitan akses permodalan dan pengembangan jiwa kewirausahaan pencari kerja terdaftar belum berbanding lurus
	7. Terbatasnya pemahaman pekerja tentang hak dan kewajibannya			7. Perlindungan tenaga kerja formal dan informal	7. Pemanfaatan transformasi digital	7. Jabatan fungsional mediator HI merupakan posisi strategis dalam menciptakan kondisi hubungan industrial yang harmonis
	8. Belum maksimalnya fungsi SB/SP			8. Kebijakan manajemen tenaga kerja asing		8. Digitalisasi dalam pengelolaan pasar kerja, pengelolaan operasional koperasi dan produk UMKM
	9. Masih terbatasnya pengesahan PP/PKB			9. Kebijakan hubungan industrial		9. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pengurus/pengelola koperasi dan pelaku UMKM
	10. Belum optimalnya perlindungan dan pengawasan tenaga kerja			10. Regulasi dan kebijakan pengelolaan koperasi dan UMKM		10. Akses pembiayaan bagi koperasi dan pelaku UMKM
	11. Terbatasnya SDM pengurus/pengelola koperasi yang berkemampuan & profesional			11. Akses permodalan dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM		11. Penguatan kelembagaan dan pengawasan koperasi
	12. Terbatasnya jenis usaha koperasi			12. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		12. Peningkatan kualitas produk UMKM dan perluasan jaringan pemasaran
	13. Terbatasnya akses koperasi terhadap lembaga-lembaga permodalan					
	14. Terbatasnya kemampuan koperasi menggunakan Teknologi informasi					
	15. Terbatasnya pelaku UMKM inovatif dan adaptif dalam menghasilkan produk-produk unggulan					
	16. Terbatasnya akses permodalan bagi pelaku UMKM					
	17. Terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi merupakan cita-cita umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan rujukan utama dalam perumusan arah pembangunan. Visi dirumuskan untuk menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah serta sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah Kota Jambi tahun 2025 – 2029, yaitu :

Mewujudkan Kota Perdagangan dan Jasa yang Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif dan Sejahtera

Rumusan cita-cita yang ingin diwujudkan dari visi tersebut, diuraikan sebagai berikut :

- **Bersih** : Mengandung makna mempertahankan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya dan pemanfaatan energi terbarukan dengan terus memperkuat sistem perkotaan yang merata dan terintegritas;
- **Aman** : Mengandung makna menciptakan suasana kota yang tertib, aman dan nyaman dalam mendukung kehidupan masyarakat;
- **Harmonis** : Mengandung makna menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan guna memperhitungkan kepentingan jangka dan kesejahteraan generasi mendatang;
- **Agamis** : Mengandung makna meningkatkan kualitas akhlak masyarakat dan memperkuat budaya serta kearifan local sebagai identitas, daya Tarik, dan potensi wisata;
- **Inovatif** : Mengandung makna memperkuat kreatifitas, inovasi, pemanfaatan teknologi, dan informasi dalam meningkatkan pelayanan serta perwujudan kota pintar melalui pemerintah yang baik ; dan

- **Sejahtera** : Mengandung makna mewujudkan SDM yang berdaya saing untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

Guna mencapai visi yang telah ditetapkan, diperlukan upaya-upaya yang direncanakan untuk dilaksanakan. Upaya tersebut dirinci dalam beberapa misi.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun internal. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai misi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai melalui agenda pembangunan yang dilaksanakan.

Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kota Jambi, yaitu :

1. Misi 1 : Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia ;
2. Misi 2 : Penguatan kapasitas Ekonomi Perkotaan ;
3. Misi 3 : Penguatan Tata Kelola Pemerintah yang Baik ;
4. Misi 4 : Penguatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan serta Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan ;
5. Misi 5 : Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan lingkungan Hidup Yang Merata, Berkualitas dan Berkelanjutan.

Setiap misi akan diuraikan menjadi beberapa sasaran yang merupakan target-target spesifik, terukur dan terjangkau. Sasaran memberikan kejelasan tentang apa yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu dan menjadi panduan dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi urusan masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, maka sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Walikota Jambi dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan dan urusan Koperasi UMKM, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi mengakomodir misi ke-2 (dua) : **Penguatan Kapasita Ekonomi Perkotaan.**

Misi ke-2 (dua) dijabarkan dalam 6 (enam) sasaran dengan 6 (enam) indikator, yaitu :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Tersier
Indikator : Kontribusi Sektor Tersier Terhadap PDRB
2. Sasaran 2 : Peningkatan Realisasi Investasi
Indikator : Realisasi Investasi
3. Sasaran 3 : Terkendalinya Investasi
Indikator : Laju Inflasi
4. Sasaran 4 : Penurunan Gini Ratio
Indikator : Gini Ratio
5. Sasaran 5 : Penurunan Angka Pengangguran
Indikator : Tingkat Pengangguran Terbuka
6. Sasaran 6 : Peningkatan Daya Saing Daerah
Indikator : Indeks Daya Saing Daerah

Dari uraian misi, sasaran dan indikator sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029, kontribusi Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi dapat dirinci sebagai berikut :

- Misi : ke - 2 ➡ Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan
- Sasaran : (4) Penurunan Gini Ratio
(5) Penurunan Pengangguran
- Indikator : (4) Gini Ratio
(5) Tingkat Pengangguran Terbuka

3.2. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan perangkat daerah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi kepala daerah yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu dokumen perencanaan.

Tujuan perangkat daerah pada hakekatnya membantu kepala daerah menyelenggarakan urusan pemerintah, melaksanakan pelayanan publik, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjalankan tugas dan fungsi yang terstruktur, sistematis, serta akuntabel, melalui penjabaran visi misi kepala daerah menjadi program yang terukur, serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Mengacu kepada visi, misi, sasaran strategis dan indikator sasaran strategis yang tertuang dalam RPJMD Kota Jambi, Dinas Tenaga Kerja

Koperasi dan UKM Kota Jambi menjadi leading sektor pencapaian target kinerja penurunan tingkat pengangguran terbuka dan gini ratio.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka dan gini ratio, yaitu :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka
 - a. Pertumbuhan Ekonomi ;
 - b. Pertumbuhan Penduduk ;
 - c. Iklim Investasi ;
 - d. Tingkat Inflasi ;
 - e. Tingkat Pendidikan ;
 - f. Ketersediaan Lapangan Kerja ;
 - g. Keterampilan/Keahlian Tenaga Kerja/Pencari Kerja.
2. Gini Ratio
 - a. Kebijakan Pemerintah (pajak, bantuan sosial) ;
 - b. Akses Pendidikan dan Kesehatan ;
 - c. Pasar Kerja (tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, kesenjangan upah, keterampilan/keahlian pencari kerja/tenaga kerja) ;
 - d. Tingkat Kemiskinan ;
 - e. Pertumbuhan Ekonomi ;
 - f. Kondisi Geografis dan Struktur Sosial ;
 - g. Teknologi ;
 - h. Iklim Investasi.

Dari beberapa faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan gini ratio, berdasarkan tugas dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi berperan dalam memfasilitasi keterbukaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan/keahlian tenaga kerja/pencari kerja, serta pasar kerja (tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, kesenjangan upah), yang dapat dilaksanakan melalui pemberdayaan dan pengembangan tenaga kerja, pemberdayaan dan pengembangan lembaga koperasi maupun pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Dari uraian di atas serta melihat korelasi peran dan kontribusi Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Jambi tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan

faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka dan gini ratio, maka ditetapkan tujuan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi tahun 2025-2029 adalah :

Menurunkan Angka Pengangguran dan Kesenjangan Pendapatan Penduduk Melalui Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM yang Mandiri.

Dengan indikator tujuan :

1. Persentase Peningkatan Penyerapan Pencari Kerja dan Keselaran Hubungan Industrial;
2. Persentase Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

3.3. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran perangkat daerah adalah target-target spesifik dan terukur yang ingin dicapai oleh suatu perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran merupakan penjabaran lebih detail dari tujuan dan dirumuskan dalam bentuk indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur.

Adapun sasaran Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM, yaitu :

1. **Meningkatnya penyerapan tenaga kerja terdaftar dan perlindungan tenaga kerja**, dengan indikator :
 - 1.1. Persentase penempatan pencari kerja terdaftar
 - 1.2. Persentase perusahaan dengan tata kelola yang layak
2. **Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM)**, dengan indikator :
 - 2.1. Persentase koperasi berkualitas
 - 2.2. Persentase UMKM yang Tangguh dan mandiri

Tujuan, sasaran beserta indikator dan target kinerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Indikator dan Target Tujuan Sasaran
Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM
Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	
Penurunan Gini Ratio	Menurunkan Angka Pengangguran dan Kesenjangan		Indikator Tujuan :						
			1. Persentase Peningkatan Penyerapan Pencari Kerja dan Keselarasan Hub Industrial	29,50%	31,25%	33,00%	34,75%	36,50%	36,50%
Penurunan Pengangguran	Pendapatan Penduduk Melalui Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM yang Mandiri		Indikator Sasaran :						
			2. Persentase Peningkatan Pemberdayaan koperasi	27,40%	31,80%	36,70%	41,60%	46,50%	46,50%
		1. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja	1.1 Persentase Penempatan Pencari Kerja Terdaftar	45,00%	48,00%	51,00%	54,00%	57,00%	57,00%
			1.2 Persentase Perusahaan Dengan Tata Kelola Yg Layak	14,00%	14,50%	15,00%	15,50%	16,00%	16,00%
		2. Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro kecil menengah	2.1 Persentase Koperasi Berkualitas	46,80%	48,60%	50,40%	52,00%	54,00%	54,00%
			2.2 Persentase UMKM Yg Tangguh dan Mandiri	8,00%	15,00%	23,00%	31,00%	39,00%	39,00%

3.4. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Strategi yang direncanakan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM untuk mencapai target kinerja tahun 2025-2029, yaitu :

1. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja ;
2. Meningkatkan akses informasi lowongan kerja;
3. Meningkatkan sinergitas dengan lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) dan bursa kerja khusus (BKK);

4. Penguatan kelembagaan hubungan industrial, termasuk peran serikat pekerja dan organisasi pengusaha;
5. Meningkatkan pemahaman dan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pembina hubungan industrial;
7. Memutakhirkan data ketenagakerjaan;
8. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM pengurus dan pengelola koperasi;
9. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi;
10. Meningkatkan kualitas pelaku dan produk UMKM;
11. Memperkuat strategi pemasaran dan akses permodalan;

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam mencapai target kinerja, yaitu :

1. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja terdaftar;
2. Pengembangan program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi;
3. Peningkatan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha;
4. Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang efektif dan efisien;
5. Pengembangan sistem informasi data ketenagakerjaan yang berbasis teknologi informasi;
6. Peningkatan kualitas dan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi pengurus/pengelola koperasi dan pelaku UMKM;
7. Pembinaan penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM;
8. Peningkatkan kualitas produk koperasi dan UMKM;
9. Perluasan akses permodalan, pengembangan jaringan pemasaran dan promosi;
10. Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan koperasi dan UMKM

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAN URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan serangkaian kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Setiap kegiatan memiliki target dan sasaran yang lebih spesifik. Kegiatan akan diterjemaahkan dalam sub-sub kegiatan secara lebih terperinci.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun ke depan, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi telah menetapkan masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator, target kinerja dan pagu indikatifnya.

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM/ OUTPUT KEGIATAN/ KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PENUNJANG URUSAN KETENAGAKERJAAN DAN KOPERASI, UMMKM YANG EFEKTIF DAN EFISIEN SERTA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	100%	6,571,970,000	100%	10,290,859,850	100%	9,940,402,843	100%	10,492,772,985	100%	10,859,111,629
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	75 Nilai	75 Nilai	12,615,705	75 Nilai	184,750,000	75 Nilai	207,737,500	75 Nilai	230,974,375	75 Nilai	254,473,094
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	12,615,705	8 Dokumen	31,500,000	8 Dokumen	33,075,000	8 Dokumen	34,728,750	8 Dokumen	36,465,188
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	26,250,000	2 Dokumen	27,562,500	2 Dokumen	28,940,625	2 Dokumen	30,387,656
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	26,250,000	2 Dokumen	27,562,500	2 Dokumen	28,940,625	2 Dokumen	30,387,656
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	15,750,000	1 Laporan	16,537,500	1 Laporan	17,364,375	1 Laporan	18,232,594
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	2	-	2	12,500,000	2	15,000,000	2	17,500,000	2	20,000,000
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	1	-	1	7,500,000	1	9,000,000	1	10,500,000	1	12,000,000
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	-	1	7,500,000	1	9,000,000	1	10,500,000	1	12,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen	2	-	2	7,500,000	2	10,000,000	2	12,500,000	2	15,000,000
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Berita Acara	4	-	4	25,000,000	4	30,000,000	4	35,000,000	4	40,000,000
Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Subtansi	4	-	4	25,000,000	4	30,000,000	4	35,000,000	4	40,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	5,915,414,000	100%	6,840,809,850	100%	7,182,850,343	100%	7,541,992,860	100%	7,919,092,500
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/Bulan	63 Orang/Bulan	5,703,854,000	63 Orang/Bulan	6,546,809,850	63 Orang/Bulan	6,874,150,343	63 Orang/Bulan	7,217,857,860	63 Orang/Bulan	7,578,750,750

Rencana Strategis 2025-2029

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	211,560,000	6 Dokumen	246,750,000	6 Dokumen	259,087,500	6 Dokumen	272,041,875	6 Dokumen	285,643,969
Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	6 Laporan	6 Dokumen	-	6 Dokumen	47,250,000	6 Dokumen	49,612,500	6 Dokumen	52,093,125	6 Dokumen	54,697,781
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	6,000,000	100%	15,750,000	100%	16,537,500	100%	17,364,375	100%	18,232,594
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	6,000,000	2 Laporan	15,750,000	2 Laporan	16,537,500	2 Laporan	17,364,375	2 Laporan	18,232,594
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian	100%	100%	54,112,500	100%	288,750,000	100%	303,187,500	100%	318,346,875	100%	334,264,219
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60 Paket	70 Paket	54,112,500	70 Paket	63,000,000	70 Paket	66,150,000	70 Paket	69,457,500	70 Paket	72,930,375
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	70 Orang	-	70 Orang	15,750,000	70 Orang	16,537,500	70 Orang	17,364,375	70 Orang	18,232,594
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	20 Orang	-	20 Orang	210,000,000	20 Orang	220,500,000	20 Orang	231,525,000	20 Orang	243,101,250
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	157,856,898	100%	709,800,000	100%	745,290,000	100%	782,554,500	100%	821,682,225
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2,992,408	1 Paket	6,300,000	1 Paket	6,615,000	1 Paket	6,945,750	1 Paket	7,293,038
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	10 Paket	14,387,380	10 Paket	210,000,000	10 Paket	220,500,000	10 Paket	231,525,000	10 Paket	243,101,250
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	18,327,110	1 Paket	52,500,000	1 Paket	55,125,000	1 Paket	57,881,250	1 Paket	60,775,313
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Laporan	30 Laporan	6,800,000	30 Laporan	21,000,000	30 Laporan	22,050,000	30 Laporan	23,152,500	30 Laporan	24,310,125
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan	115,350,000	40 Laporan	420,000,000	40 Laporan	441,000,000	40 Laporan	463,050,000	40 Laporan	486,202,500
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Proses Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	0	100%	1,420,000,000	100%	591,000,000	100%	643,050,000	100%	486,202,500
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	5	-	6	1,000,000,000	5	150,000,000	5	180,000,000	0	0
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Paket	10 Unit	-	10 Unit	210,000,000	10 Unit	220,500,000	10 Unit	231,525,000	10 Unit	243,101,250
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	10 Unit	-	10 Unit	210,000,000	10 Unit	220,500,000	10 Unit	231,525,000	10 Unit	243,101,250
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	142,970,897	100%	367,500,000	100%	385,875,000	100%	405,168,750	100%	425,427,188
Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	37,456,950	2 Laporan	157,500,000	2 Laporan	165,375,000	2 Laporan	173,643,750	2 Laporan	182,325,938
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	3 Laporan	3 Laporan	105,513,947	3 Laporan	210,000,000	3 Laporan	220,500,000	3 Laporan	231,525,000	3 Laporan	243,101,250
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	283,000,000	100%	463,500,000	100%	507,925,000	100%	553,321,250	100%	599,737,310

Rencana Strategis 2025-2029

Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit	266,350,000	24 Unit	315,000,000	24 Unit	330,750,000	24 Unit	347,287,500	24 Unit	364,651,875
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	16,650,000	3 Unit	73,500,000	3 Unit	77,175,000	3 Unit	81,033,750	3 Unit	85,085,435
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1	-	2	75,000,000	2	100,000,000	3	125,000,000	3	150,000,000
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	TERKELOLANYA INFORMASI TENAGA KERJA	JUMLAH DOKUMEN RENCANA TENAGA KERJA MAKRO	Dokumen			1 Dokumen	120,000,000						
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersedianya Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen			1 Dokumen	120,000,000						
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen			1 Dokumen	120,000,000						
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA di SEKTOR PRIORITAS YANG MENINGKAT PRODUKTIVITASNYA	69%	70%	120,091,374	72%	461,849,872	74%	467,347,570	76%	561,500,216	78%	567,561,428
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Bagi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Dilatih yang Ditempatkan dan Berwirausaha	69%	70%	120,091,374	72%	351,895,924	74%	351,895,924	76%	440,275,988	78%	440,275,988
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	16 Orang	64 Orang	120,091,374	96 Orang	351,895,924	96 Orang	351,895,924	128 Orang	440,275,988	128 Orang	440,275,988
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Monitoring terhadap Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang Dimonitoring	-	25 Lembaga	-	25 Lembaga	22,565,356	25 Lembaga	23,693,624	25 Lembaga	24,878,305	25 Lembaga	26,122,221
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	25 Lembaga	-	25 Lembaga	22,565,356	25 Lembaga	23,693,624	25 Lembaga	24,878,305	25 Lembaga	26,122,221
Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Produktivitas	-	20 Perusahaan	-	20 Perusahaan	87,388,592	20 Perusahaan	91,758,022	20 Perusahaan	96,345,923	20 Perusahaan	101,163,219
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	20 Perusahaan	-	20 Perusahaan	87,388,592	20 Perusahaan	91,758,022	20 Perusahaan	96,345,923	20 Perusahaan	101,163,219
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	MENINGKATNYA PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN DI DALAM NEGERI	51%	52%	129,908,626	53%	235,571,526	54%	244,586,413	55%	253,930,108	56%	263,649,144
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepuasan Pelayanan Antar Kerja	92%	92%	-	92%	29,208,702	92%	29,208,702	92%	29,208,702	92%	29,208,702
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	1500 Orang	60 Orang	-	50 Orang	29,208,702	50 Orang	29,208,702	50 Orang	29,208,702	50 Orang	29,208,702
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Kegiatan Pameran Kesempatan Kerja/ Job Fair	Persentase Penyerapan Lowongan Kerja Pada IPK	70%	74%	129,908,626	75%	131,525,898	76%	138,102,200	77%	145,007,310	78%	152,287,760
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1000 Orang	1500 Orang	59,408,626	1200 Orang	60,335,898	1250 Orang	63,352,700	1300 Orang	66,520,335	1350 Orang	69,846,435
Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	550 Orang	500 Orang	70,500,000	520 Orang	71,190,000	540 Orang	74,749,500	560 Orang	78,486,975	580 Orang	82,441,325
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten Kota	Terlaksananya Pemberdayaan PMI (Pra dan Purna)	Persentase CPMI Purna dan Keluarganya yang Diberdayakan	0	10%	-	15%	74,836,926	20%	77,275,511	25%	79,714,096	30%	82,152,682
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	20 Orang	-	25 Orang	74,836,926	30 Orang	77,275,511	35 Orang	79,714,096	40 Orang	82,152,682

Rencana Strategis 2025-2029

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	MENINGKATNYA PEKERJA INDONESIA YANG TERLINDUNGI	JUMLAH PEKERJA PADA PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA	14%	16.00%	950,000,000	16.50%	402,816,745	17.00%	422,957,582	17.50%	444,105,462	18.00%	466,310,735
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Perjanjian Kerja Bersama	Persentase Peningkatan Perusahaan yang Memiliki Pengesahan Peraturan Perusahaan	5%	6%	18,290,310	6%	70,437,806	7%	73,959,696	7%	77,657,681	8%	81,540,566
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	25 Perusahaan	-	25 Perusahaan	30,426,821	25 Perusahaan	31,948,162	25 Perusahaan	33,545,570	25 Perusahaan	35,222,849
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan	12 Laporan	18,290,310	12 Laporan	40,010,985	12 Laporan	42,011,534	12 Laporan	44,112,111	12 Laporan	46,317,717
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Perjanjian Bersama	100%	100%	931,709,690	100%	332,378,939	100%	348,997,886	100%	366,447,781	100%	384,770,169
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	931,709,690	1 Lembaga	289,387,785	1 Lembaga	303,857,174	1 Lembaga	319,050,033	1 Lembaga	335,002,534
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	75 Orang	-	75 Orang	42,991,154	75 Orang	45,140,712	75 Orang	47,397,748	75 Orang	49,767,635
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	PERSENTASE PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-	27.27%	-	30.27%	21,558,403	33.27%	23,714,243	36.27%	26,085,667	39.27%	28,694,233
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	Terlaksananya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi sesuai dengan Prinsip Koperasi dan Ketentuan yang Berlaku	Persentase Koperasi yang Mendapat Predikat Sehat/ Cukup Sehat	-	27.27%	-	30.27%	21,558,403	33.27%	23,714,243	36.27%	26,085,667	39.27%	28,694,233
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	60 Unit Usaha	-	70 Unit Usaha	21,558,403	80 Unit Usaha	23,714,243	90 Unit Usaha	26,085,667	100 Unit Usaha	28,694,233
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	MENINGKATNYA KUALITAS SDM PERKOPERASIAN	PERSENTASE KOPERASI YANG DIBERIKAN DUKUNGAN FASILITASI PELATIHAN	33.1%	13.25%	122,295,620	16.25%	192,127,471	19.25%	201,733,844	22.25%	211,820,536	25.25%	222,411,583
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Pengetahuan serta Kemampuan dan Pemahaman SDM Koperasi dalam Mengelola Koperasi	Persentase SDM Koperas yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	33.1%	13.25%	122,295,620	16.25%	192,127,471	19.25%	201,733,844	22.25%	211,820,536	25.25%	222,411,583
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	120 Orang	200 Orang	122,295,620	245 Orang	192,127,471	260 Orang	201,733,844	275 Orang	211,820,536	300 Orang	222,411,583

Rencana Strategis 2025-2029

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS KOPERASI	PERSENTASE MENINGKATNYA KOPERASI YANG BERKUALITAS	15.59%	17.59%	127,704,380	19.59%	560,905,631	21.59%	573,335,910	23.59%	586,175,402	25.59%	604,440,324
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Tata Kelola SDM Koperasi	Persentase Omset Koperasi	15.59%	17.59%	127,704,380	19.59%	560,905,631	21.59%	573,335,910	23.59%	586,175,402	25.59%	604,440,324
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	52 Unit Usaha	75 Unit Usaha	102,725,742	90 Unit Usaha	207,072,221	105 Unit Usaha	212,425,832	120 Unit Usaha	218,047,123	135 Unit Usaha	228,949,479
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Koperasi	68	24,978,638	68	353,833,410	68	360,910,078	68	368,128,279	68	375,490,845
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	MENINGKATNYA KAPASITAS UMKM YANG TANGGUH DAN MANDIRI	1. PERSENTASE USAHA KECIL YANG BERTRANSFORMASI DARI INFORMAL KE FORMAL 2. PERTUMBUHAN WIRUSAHA	79.38%	81%	200,000,000	83.00%	3,980,500,000	85.00%	4,618,000,000	87.00%	5,292,000,000	89.00%	6,006,100,000
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Peningkatan UMKM yang Berkualitas	Persentase Pelaku UMKM Binaan	15.13%	17.00%	200,000,000	19.00%	3,980,500,000	21.00%	4,618,000,000	23.00%	5,292,000,000	25.00%	6,006,100,000
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	1700 Unit Usaha	162,848,929	2000 Unit Usaha	1,500,000,000	2300 Unit Usaha	1,725,000,000	2645 Unit Usaha	1,985,000,000	3000 Unit Usaha	2,283,000,000
Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	250 Unit Usaha	-	300 Unit Usaha	1,200,000,000	350 Unit Usaha	1,400,000,000	400 Unit Usaha	1,600,000,000	450 Unit Usaha	1,800,000,000
Penyusunan Basis Data	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit Usaha	2000 Unit Usaha	-	2300 Unit Usaha	80,500,000	2650 Unit Usaha	93,000,000	3050 Unit Usaha	107,000,000	3600 Unit Usaha	123,100,000
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	167 Orang	250 Orang	37,151,071	300 Orang	1,200,000,000	350 Orang	1,400,000,000	400 Orang	1,600,000,000	450 Orang	1,800,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	MENINGKATNYA DAYA SAING UMKM	PROPORSI UKM MENJALIN KEMITRAAN DAN EKSPOR	%	25%	0	27%	920,000,000	29%	1,058,750,000	31%	1,206,262,500	33%	1,387,701,875
Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Peningkatan Jumlah UMKM	Persentase Peningkatan Skala Usaha (Indikator Lama)	%	22%	0	24%	920,000,000	26%	1,058,750,000	28%	1,206,262,500	30%	1,387,701,875
Pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	200 Unit Usaha	-	230 Unit Usaha	575,000,000	265 Unit Usaha	662,000,000	300 Unit Usaha	750,000,000	350 Unit Usaha	863,000,000
Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Terfasilitasinya Wirusaha Pemula Menjadi Wirusaha Mapan	Jumlah yang Difasilitasi	Orang	200 Unit Usaha	-	230 Unit Usaha	345,000,000	265 Unit Usaha	396,750,000	300 Unit Usaha	456,262,500	350 Unit Usaha	524,701,875

4.2. Program Prioritas Perangkat Daerah

Program prioritas perangkat daerah merupakan program yang menjadi fokus utama perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Program prioritas ini harus sejalan dengan program prioritas pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Untuk Tahun 2025-2029, program prioritas Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM yang sejalan dengan program prioritas RPJMD Kota Jambi, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Program Prioritas Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	
2	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Produktivitas Koperasi Binaan	Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	

Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja menjadi program prioritas pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi, karena melalui program ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pencari kerja terdaftar untuk mampu bersaing di pasar kerja dan untuk menjadi tenaga kerja mandiri (wirausaha).

Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi dilaksanakan guna mendukung terlaksananya program prioritas RPJMD Kota Jambi yaitu

meningkatkan kualitas koperasi, baik koperasi aktif yang telah lama terbentuk maupun koperasi yang baru didirikan melalui program nasional koperasi desa/kelurahan merah putih (KDMP). Dengan jumlah koperasi kelurahan merah putih yang terbentuk di Kota Jambi sebanyak 68 (enam puluh delapan) koperasi, diperlukan upaya pembinaan secara intensif dan berkelanjutan, yang diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian berbasis kawasan.

Disamping itu, pembinaan kelompok-kelompok UMKM yang masih menjadi salah satu kegiatan unggulan, juga akan diarahkan menjadi kelompok pra koperasi guna menumbuhkan jiwa gotong royong dan kekeluargaan antara pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya secara kolektif. Dengan terbentuknya kelompok pra koperasi, diharapkan fasilitasi pembinaan oleh Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi lebih berkesinambungan dan tepat sasaran. Pelaku UMKM yang bersinergi melalui kelompok-kelompok UMKM akan lebih terkoordinir dan terarah manajemen kelembagaannya melalui kelompok pra koperasi, setelah berproses dengan baik diharapkan dapat dilegalkan melalui pengesahan Badan Hukum (BH) koperasi dan pada akhirnya mampu menyerapkan tenaga kerja dalam kegiatan operasionalnya.

Secara simultan, penyerapan tenaga kerja juga diharapkan dapat ditingkatkan melalui berdirinya wirausaha baru, baik dari pelaku UMKM yang telah bertransformasi menjadi wirausaha mandiri maupun pencari kerja terdaftar yang telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dan menjadi tenaga kerja mandiri (TKM).

Siklus ini diharapkan dapat berjalan sesuai perencanaan yang telah disusun untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sehingga capaian indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator kinerja kunci (IKK) Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2025-2030, secara rinci dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama
2025-2030
Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUSAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-						KET			
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
Menurunkan Angka Pengangguran dan Kesenjangan Pendapatan Penduduk Melalui Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM yang Mandiri		Indikator Tujuan :											
		1.	Persentase Peningkatan Penyerapan Pencari Kerja dan Keselarasan Hub Industrial	(% penempatan pencari terdaftar + % perusahaan dgn tata kelola yang layak)	x	100%	29,50%	31,25%	33,00%	34,75%	36,50%	38,25%	
				2									
		2.	Persentase Peningkatan Pemberdayaan koperasi	(% koperasi berkualitas + % UMKM yang tangguh dan mandiri)	x	100%	27,40%	31,80%	36,70%	41,60%	46,50%	52,92%	
				2									
				Indikator Sasaran :									
	1.	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja	1.1	Persentase Penempatan Pencari Kerja Terdaftar	Jmh pencari ditempatkan Jmh pencari terdaftar	x	100%	45,00%	48,00%	51,00%	54,00%	57,00%	60,00%
			1.2	Persentase Perusahaan Dengan Tata Kelola Yg Layak	Jmh perusahaan dgn tata kelola yg layak Jmh perusahaan wajib lapor	x	100%	14,00%	14,50%	15,00%	15,50%	16,00%	16,50%
	2.	Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro kecil menengah	2.1	Persentase Koperasi Berkualitas	Jmh koperasi berkualitas Jmh koperasi aktif	x	100%	46,80%	48,60%	50,40%	52,00%	54,00%	55,90%
			2.2	Persentase UMKM Yg Tangguh dan Mandiri	Jmh UMKM yang berwirausaha Jmh UMKM binaan	x	100%	8,00%	15,00%	23,00%	31,00%	39,00%	50,00%

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci Urusan Tenaga Kerja
2025-2030
Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM

NO	OUTCOME	RUMUS	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$\frac{\text{jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100 \%$	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100 \%$	7.50%	7.60%	7.70%	7.80%	7.90%	8.00%
3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100 \%$	15.00%	16.00%	17.00%	18.00%	19.00%	20.00%
4	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar}} \times 100 \%$	52.50%	55%	57.50%	60.00%	62.50%	65.00%
5	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD}}{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan}} \times 100 \%$	85.00%	87.50%	90.00%	92.50%	95.00%	97.50%
NO	OUTPUT	RUMUS	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	$\frac{\text{Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNi atau okupasi pada tahun n}}{\text{kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n}} \times 100 \%$	11.11%	44.44%	44.44%	55.55%	55.55%	55.55%
2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n}}{\text{Jumlah instruktur keseluruhan}} \times 100 \%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	$\frac{\text{Jumlah Instruktur Pada tahun n}}{\text{Jumlah peserta pelatihan pada tahun n}} \times 100 \%$	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%	6.25%
4	Persentase LPK yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n}}{\text{Jumlah seluruh LPK pada tahun n}} \times 100 \%$	0.00%	10.00%	20.00%	30.00%	40.00%	50.00%
5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	$\frac{\text{Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n}}{\text{Jumlah LPK yang terdata}} \times 100 \%$	60.00%	100%	100%	100%	100%	100%

Rencana Strategis 2025-2029

6	Jumlah penganggur yang dilatih		32	64	80	96	112	128
7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n _____ x 100 % jumlah orang yang dilatih pada tahun n	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n _____ x 100 % jumlah lulusan pada tahun n	71.80%	72.50%	75.00%	77.50%	80.00%	82.50%
9	Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n _____ x 100 % jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n	0	50.00%	100%	100%	100%	100%
10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	CPMI dilatih ----- x 100 % CPMI terdaftar	0	0	0	0	0	0
11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)		0	0	0	0	0	0
12	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jmlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n _____ x 100 % jumlah perusahaan pada tahun n	0	0	0	0	0	0
13	Data tingkat produktivitas total		0	0	0	0	0	0
14	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n _____ x 100 % 10 orang atau lebih	25.00%	30%	35.00%	40.00%	45.00%	50.00%
15	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n _____ x 100 % Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB	15.00%	15%	16.00%	16.00%	17.00%	17.00%
16	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan		167	168	169	170	171	172
17	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah _____ x 100 % Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB)	20.00%	25%	30.00%	35.00%	40.00%	45.00%
18	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang sdah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan _____ x 100 % Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	70.00%	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%	95.00%
19	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih _____ x 100 % Jumlah perusahaan pada tahun n	7.00%	6.00%	5.00%	4.00%	3.00%	2.00%
20	Jumlah mogok kerja		0	0	0	0	0	0
21	Jumlah penutupan perusahaan		2	2	2	2	2	2
22	Jumlah perselisihan kepentingan		1	1	1	1	1	1
23	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan		0	0	0	0	0	0

Rencana Strategis 2025-2029

24	Jumlah perselisihan PHK		40	38	36	34	32	30
25	Jumlah pekerja/buruh yang ter- PHK		50	50	45	45	40	40
26	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite		3	4	5	6	7	8
27	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan		1	1	1	1	1	1
28	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah perjanjian bersama ----- x 100 % Jumlah kasus perselisihan	50%	52.00%	55.00%	60.00%	62.00%	65.00%
29	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota		1800	1850	1900	1950	2000	2050
30	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota		1500	1550	1600	1650	1700	1750
31	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota		29	35	40	45	50	55
32	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota		29	35	40	45	50	55
33	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja		7	7	7	7	7	7
34	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota		5	7	10	13	15	20
35	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota		100	100	100	100	100	100
36	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)		5	7	10	13	15	20
37	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi ----- x 100 % CPMI/CTKI	100	100	100	100	100	100
38	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata		18	20	22	25	27	30
39	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	Dengan rincian : Fasilitasi PMI yang di pulangkan ----- x 100 % PMI yang pulang	-	-	-	-	-	-
40	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja ----- x 100 % PMI/TKI	-	-	-	-	-	-
41	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan ----- x 100 % PMI/TKI purna dan keluarganya	-	-	-	-	-	-
42	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	LTSE yang terbentuk ----- x 100 % Jumlah daerah kantong PMI/TKI :	-	-	-	-	-	-
43	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.		1	1	1	1	1	1
44	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Realisasi Indikator -target indikator : ----- x 100 % realisasi :	50.00%	60.00%	70.00%	80.00%	90.00%	100.00%
45	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota		141	145	150	155	160	165

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Urusan Koperasi UMKM
2025-2030
Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM

NO	OUTCOME	RUMUS	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT , Volume usaha dan Aset ----- x 100 % Jumlah seluruh koperasi	31.81%	34.09%	36.36%	38.63%	40.90%	43.18%
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha ----- x 100 % Jumlah usaha mikro keseluruhan	15.00%	15.00%	15.50%	15.50%	6.00%	6.00%
NO	OUTPUT	RUMUS	TARGET					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan ----- x 100 % Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam	0.90%	0.90%	0.90%	0.90%	0.90%	0.90%
2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor usaha simpan pinjam pada tahun yang di laporkan ----- x 100 % Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang-cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan di awasi ----- x 100 % Jumlah Koperasi yang ada	6.80%	9.09%	11.36%	13.63%	15.90%	18.18%
4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya ----- x 100 % Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada	11.36%	13.63%	15.90%	18.18%	20.45%	22.72%
5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ----- x 100 % Jumlah koperasi yang ada	27.27%	29.54%	31.81%	34.09%	36.36%	38.63%
6	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dalam daerah kabupaten/kota dengan wilayah keanggotaan	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian ----- x 100 % Jumlah anggota koperasi yang ada	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ----- x 100 % Jumlah koperasi yang ada	0.45%	0.45%	0.45%	0.90%	0.90%	0.90%
8	Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan		30	30	30	30	30	30

Rencana Strategis 2025-2029

9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) ----- x 100 % Jumlah koperasi yang ada	4.50%	5.45%	6.36%	7.27%	8.18%	9.09%
10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan ----- x 100 % Jumlah koperasi yang ada	13.63%	13.63%	13.63%	13.63%	13.63%	13.63%
11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran ----- x 100 % Jumlah Koperasi yang ada	1.36%	1.36%	1.36%	1.36%	1.36%	1.36%
12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha ----- x 100 % Jumlah koperasi yang ada	6.81%	13.63%	13.63%	13.63%	13.63%	13.63%
13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan ----- x 100 % Jumlah Koperasi yang ada	6.81%	6.81%	6.81%	6.81%	6.81%	6.81%
14	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru ----- x 100 % jumlah wirausaha yang ada	15.00%	15.00%	15.25%	15.25%	15.50%	15.50%
15	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS) ----- x 100 % Jumlah usaha mikro yang ada						
16	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Jumlah usaha mikro yang bermitra ----- x 100 % jumlah usaha mikro yang ada	0.10%	0.15%	0.20%	0.25%	0.30%	0.35%
17	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi ----- x 100 % Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk	1.50%	1.50%	1.50%	2.00%	2.00%	2.00%
18	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran ----- x 100 % Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran	1.50%	1.50%	1.50%	2.00%	2.00%	2.00%
19	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan ----- x 100 % Jumlah usaha mikro yang ada	1.50%	1.50%	1.75%	1.75%	2.00%	2.00%
20	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha ----- x 100 % Jumlah usaha mikro yang ada	1.50%	1.50%	1.75%	1.75%	2.00%	2.00%

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RESNTRA) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi dan Misi Kepala Daerah yang dijabarkan melalui penetapan tujuan, sasaran, arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan perangkat daerah beserta indikator, target dan pagu anggarannya yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Substansi dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) terletak pada pencapaian program-program prioritas perangkat daerah yang menjaga keselarasan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keselarasan dokumen mengindikasikan penyelenggaraan pembangunan telah memperhitungkan konsep pembangunan terintegrasi dan berkesinambungan.

Rencana Strategis (RENSTRA) akan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan setiap bidang untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan memperhatikan tugas dan fungsi utama serta perkembangan lingkungan strategis serta kebijakan-kebijakan nasional yang mungkin berubah.

Penetapan tahapan-tahapan pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan diharapkan mampu menjadi langkah konkrit Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi dalam pembangunan ketenagakerjaan, perkoperasian dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) menjadi lebih berkembang dari sebelumnya, serta memberikan dampak positif bagi kehidupan bermasyarakat khususnya di Kota Jambi.